



PEMERINTAHAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

DPPR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN --- 2022

DINAS PERTANAHAN & PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Muso Bin Salim No.06 ,Tenggarong 75512.
website: www.pertaru.kukarkab.go.id



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs.EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

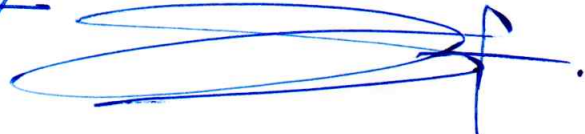
Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	65
2.	Meningkatnya Penataan, Penguasaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah garapan Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persen	80
		Persentase Penetapan tanah untuk pembangunan Fasilitas Umum	Persen	70
		Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform yang siap di redistribusikan ke masyarakat	Persen	83
		Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	Persen	82
		Persentase Tanah Aset Pemerintah yang Bersertifikat	Persen	55
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Jumlah	1

		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
4.	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
5.	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100

Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM/SUB.KEGIATAN/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.815.875.017	APBDP
2.	Program Redtribusi Tanah, Serta ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absantee	80.000.000	APBDP
3.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	114.500.000	APBDP
4.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	408.000.500	APBDP
5.	Program Penatagunaan Tanah	50.540.000	APBDP
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.195.000.000	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.663.915.517	APBDP

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**


SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.SURYA AGUS,SP.,M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

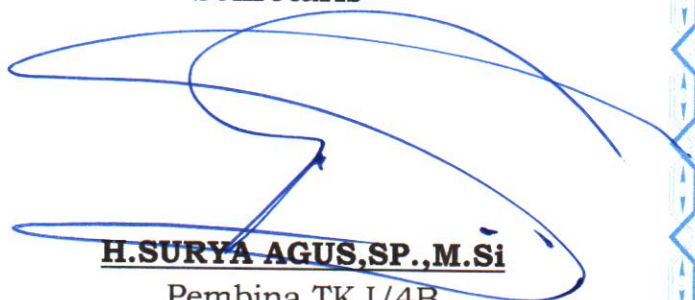
Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
Sekretaris



H.SURYA AGUS, SP., M.Si
Pembina TK.I/4B
NIP.196612152000121001

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM/SUB.KEGIATAN/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.909.764.919	APBDP
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	78.099.999	APBDP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.175.400	APBDP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.025.600	APBDP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.893.145	APBDP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.202.095.484	APBDP
	Pengadaan peralatan mesin lainnya	313.233.000	APBDP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.104.000	APBDP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.247.483.470	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 11.815.875.017	APBDP

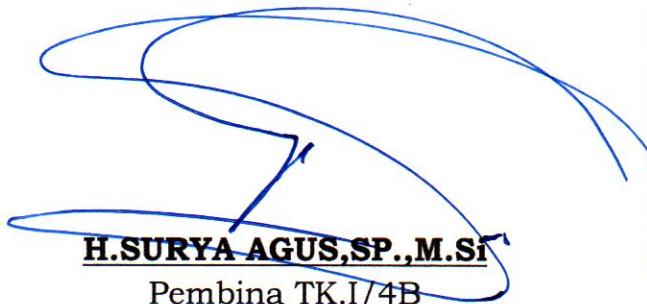
Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
Sekretaris



H.SURYA AGUS, SP., M.Si
Pembina TK.I/4B
NIP.196612152000121001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDY SANTOSO,SE,MP.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TATA RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	65
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

8. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG TATA RUANG



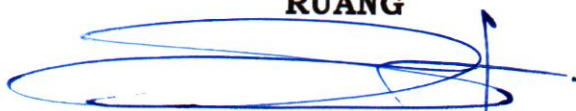
EDY SANTOSO, SE, MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pelaksanaan persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi, dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	450.000.000	APBDP
2	Pelaksanaan persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi, dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	780.000.000	APBDP
3	Koordinasi dan Sinkronisas Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	585.000.000	APBDP
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	160.000.000	APBDP
5	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	135.616.000	APBDP
6	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	84.384.000	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		2.195.000.000	APBDP

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJLSH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG TATA RUANG



EDY SANTOSO,SE,MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.TONNY HIDAYAT,ST,M.Si**

Jabatan : **PENATA RUANG AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
PEMANFAATAN & PENGENDALIAN TATA RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SANTOSO,SE,MP.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TATA RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. mengolah dan menganalisis data dan informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. menyusun kriteria penetapan pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
3. mengolah dan menganalisis data dan informasi pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
4. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
5. menyusun hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai sebagai Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;

6. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;

7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
8. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
10. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
11. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
12. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
13. Melakukan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG TATA RUANG

EDY SANTOSO,SE,MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011

Pihak Pertama,
**PENATA RUANG AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PEMANFAATAN &
PENGENDALIAN TATA RUANG**

H. TONNY HIDAYAT,ST,M.Si
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19771009 200502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya laporan hasil pemberian izin pemanfaatan ruang	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan terkait pemberian izin pemanfaatan ruang	Laporan	1
2.	Tersedianya laporan hasil kajian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Laporan	1
3.	Tersedianya laporan hasil analisis penertiban pemanfaatan ruang	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang	Laporan	1
4.	Tersedianya laporan hasil pembahasan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang	Jumlah Laporan hasil pembahasan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang	Laporan	1
5.	Tersedianya laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1

**TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PEMANFAATAN & PENGENDALIAN
TATA RUANG**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan hasil pemberian izin pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Hasil Tersedianya laporan hasil pemberian izin dan keterangan pemanfaatan ruang (PKKPR)	Dokumen	1
2	Tersedianya laporan hasil kajian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Jumlah Dokumen Hasil hasil kajian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Dokumen	1
3	Tersedianya laporan hasil analisis penertiban pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Hasil analisis penertiban pemanfaatan ruang	Dokumen	1

4	Tersedianya laporan hasil pembahasan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen hasil analisis penertiban pemanfaatan ruang	Dokumen	1
5	Tersedianya laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1
6	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
7	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

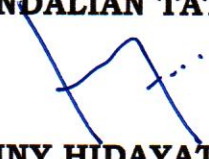
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
1	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	135.616,000	APBDP
2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	84.384,000	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 220,000,000	APBDP

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG TATA RUANG


EDY SANTOSO, SE, MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011

Pihak Pertama,
**PENATA RUANG AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PEMANFAATAN &
PENGENDALIAN TATA RUANG**


H. TONNY HIDAYAT, ST, M. Si
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19771009 200502 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUDO ARIWINANTO,ST**

Jabatan : **PENATA RUANG AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN TATA RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SANTOSO,SE,MP.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TATA RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. menyusun kriteria dan ketentuan peraturan zonasi;
2. menyusun konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
3. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
4. menyusun substansi teknis pengaturan rencana tata ruang;
5. menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang;
6. menyusun hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
7. menyusun prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai sebagai Sub Koordinator;

8. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;

9. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
10. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
11. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
12. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
13. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
14. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
15. Melakukan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

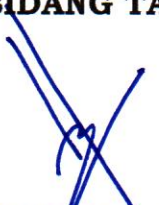
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG TATA RUANG


EDY SANTOSO, SE, MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011

Pihak Pertama,
**PENATA RUANG AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PERENCANAAN
TATA RUANG**


YUDO ARIWINANTO, ST
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19820617 201101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan peraturan zonasi	Jumlah Laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan peraturan zonasi	Laporan	1
2.	Tersedianya Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Dokumen	1
3.	Tersedianya laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
4.	Tersedianya substansi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Laporan hasil substansi teknis pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
5.	Tersedianya laporan hasil telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang	Jumlah laporan hasil telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
6	Tersedianya laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1
7	Tersedianya Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Jumlah Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Dokumen	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PERENCANAAN TATA RUANG

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan peraturan zonasi	Jumlah Laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan peraturan zonasi	Laporan	1
2	Tersedianya Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Dokumen	1
3	Tersedianya laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
4	Tersedianya substansi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Laporan hasil substansi teknis pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
5	Tersedianya laporan hasil telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang	Jumlah laporan hasil telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
6	Tersedianya laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1
7	Tersedianya Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Jumlah Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Dokumen	1

8	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
9	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
10	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	450,000,000	APBDP
2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	780,000,000	APBDP
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	585,000,000	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 1.815.000.000	APBDP

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG TATA RUANG

~~**EDY SANTOSO, SE, MP.**
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011~~

Pihak Pertama,
**PENATA RUANG AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PERENCANAAN
TATA RUANG**


YUDO ARIWINANTO, ST
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19820617 201101 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAIFUL ANWAR, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.SURYA AGUS,SP.,M.Si**

Jabatan : **Sekretaris**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

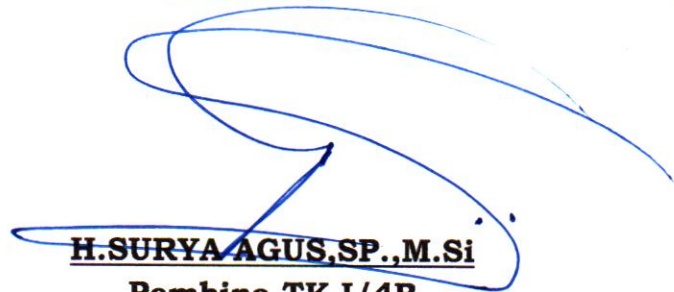
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris



H.SURYA AGUS, SP., M.Si
Pembina TK.I/4B
NIP.196612152000121001

Pihak Pertama,
**Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK.I/3D
NIP.197106192001121001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik	Jumlah Komponen	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	45
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1). Jenis 2). Kotak, 3). Porsi	1). 7 2). 1200 3). 1000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1) jenis 2) Lembar	1) 4 2) 36000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	15
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	1
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	5
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS, 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1) Orang, 2) Orang	1) 51 2) 8
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaran dinas	Unit	6
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	Unit	6

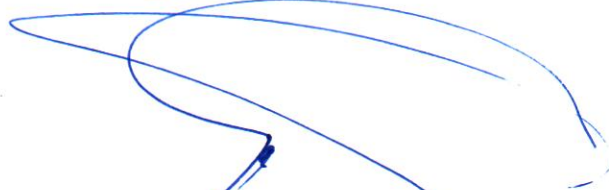
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	Gedung	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 163.175.400	APBDP
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 344.893.145	APBDP
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp. 207.025.600	APBDP
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.202.095.484	APBDP
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 350.140.000	APBDP
6	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Rp. 313.233.000	APBDP
7	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 1.247.483.470	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 3.828.046.099	APBDP

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris



H.SURYA AGUS, SP., M.Si
Pembina TK.I/4B
NIP.196612152000121001

Pihak Pertama,
**Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK.I/3D
NIP.197106192001121001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA WAHYUNI,SP**

Jabatan : **PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORD
PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.SURYA AGUS,SP.,M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. mengolah data dan informasi;
2. mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
3. menganalisis data dan informasi;
4. menyajikan data dan informasi;
5. menyusun rancangan Rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
6. melakukan persiapan Pengendalian pelaksanaan rencana;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai sebagai Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan;

7. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;

8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
9. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
11. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
12. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
13. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
14. Melakukan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

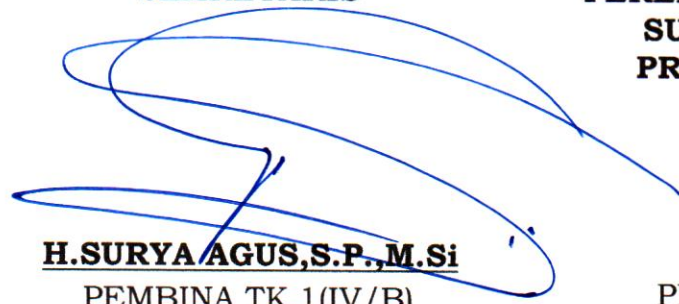
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



H.SURYA AGUS, S.P., M.Si
PEMBINA TK.1(IV/B)
NIP. 19661215 200012 1 001

Pihak Pertama,
**PERENCANA AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORD PENYUSUNAN
PROGRAM DAN KEUANGAN**



INDRA WAHYUNI, SP
PENATA TINGKAT 1 (III/d)
NIP. 19780617 200801 2 023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya laporan hasil pengolahan data dan informasi	Jumlah Laporan hasil pengolahan data dan informasi	Laporan	1
2.	Tersedianya laporan pelaksanaan pengumpulan data	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengumpulan data	Laporan	1
3.	Tersedianya laporan hasil analisis data dan informasi	Jumlah Laporan hasil analisis data dan informasi	Laporan	1
4.	Tersedianya laporan hasil penyajian data dan informasi	Jumlah Laporan penyajian data dan informasi	Laporan	1
5.	Tersedianya rancangan Rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan	Jumlah rancangan Rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan	Rancangan	1
6.	Tersedianya laporan persiapan Pengendalian pelaksanaan rencana	Jumlah laporan persiapan Pengendalian pelaksanaan rencana	Laporan	1

**TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PENYUSUNAN
PROGRAM DAN KEUANGAN**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10
2	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen	5
3	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	gaji dan tunjangan bagi ASN	Dokumen	76
4	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Dokumen	2


5	Tersedianya dokumen barang milik daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	Dokumen	10
6	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
7	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
8	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen 100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.909.764.919	APBDP
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	78.099.999	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 7.987.864.918	APBDP

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


H.SURYA AGUS, S.P., M.Si
PEMBINA TK .1 (IV/B)
NIP. 19661215 200012 1 001

Pihak Pertama,
**PERENCANA AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORD PENYUSUNAN
PROGRAM DAN KEUANGAN**


INDRA WAHYUNI, SP
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP.19780617 200801 2 023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMAD DAHLAN,SH.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN, SH
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya penataan, penguasaan, dan pemanfaatan pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	70
		Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke masyarakat	Persen	83
		Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	82
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	80.000.000	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 80, 000,000	APBDP

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN,SH
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YANI WARDHANA, S.Sos**

Jabatan : **PENATA KADASTRAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ADM.PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMAD DAHLAN,SH.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menelaah data perencanaan redistribusi tanah;
2. Mengolah data pemantauan dan evaluasi hasil redistribusi tanah;
3. Menyusun konsep keputusan redistribusi tanah;
4. Mengolah data inventarisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
5. Melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pertanahan;
6. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan survey;
7. Melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survey kadastral dengan unsur terkait kabupaten/kota;
8. Menyusun Laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai sebagai Sub Koordinator;

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN,SH
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR PEMBINAAN
DAN PENGENDALIAN
ADM.PERTANAHAN**



YANI WARDHANA,S.Sos
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19680627 199403 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya laporan hasil telaahan data perencanaan redistribusi tanah;	Jumlah Laporan perencanaan redistribusi tanah	Dokumen	1
2.	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengolahan data pemantauan dan evaluasi hasil redistribusi tanah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengolahan data pemantauan dan evaluasi hasil redistribusi tanah	Dokumen	1
3.	Tersedianya laporan hasil menyusun konsep keputusan redistribusi tanah	Jumlah laporan hasil menyusun konsep keputusan redistribusi tanah	Dokumen	1
4.	Tersedianya laporan hasil Pengelolaan data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah laporan hasil pengelolaan data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen	1
5.	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pertanahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pertanahan	Dokumen	1
6.	Tersedianya laporan jadwal pelaksanaan pekerjaan survey	Jumlah laporan jadwal pelaksanaan pekerjaan survei	Dokumen	1
7.	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan penyuluhan kegiatan survey kadastral dengan unsur terkait kabupaten kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan penyuluhan kegiatan survey kadastral dengan unsur terkait kabupaten/kota	Dokumen	1
8.	Tersedianya laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral	Jumlah laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral	Dokumen	1

**TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
2	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
3	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absantee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 80,000,000	

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN,SH
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR PEMBINAAN
DAN PENGENDALIAN
ADM.PERTANAHAN**



YANI WARDHANA,S.Sos
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19680627 199403 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUNARTO,SP.,MM.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG SENGKETA TANAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**

SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
KABID SENGKETA TANAH

SUNARTO, SP., MM
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19670223 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya penataan, penguasaan, dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	80
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Inventaris sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	114,500,000	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		114,500,000	APBDP

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
KABID SENKETA TANAH



SUNARTO, SP., MM
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19670223 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.IDIL ADHA, ST**

Jabatan : **PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SELAKU SUB KOORD
PENYULUH PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARTO,SP.,MM**

Jabatan : **KABID SENGKETA TANAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melakukan Analisis Informasi Penanganan Pengaduan Pelayanan Pertanahan;
2. Menyusun Bahan Sosialisasi Pencegahan Penanganan Perkara Pertanahan Kepada stakeholder;
3. Menyusun Risalah Pengolahan data kasus pertanahan;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator Penyuluh Pertanahan

Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai

Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

1. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
3. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
4. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
5. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
6. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
KABID SENGKETA TANAH



SUNARTO, SP., MM
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19670223 199803 1 004

Pihak Pertama,
**PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORD PENYULUH PERTANAHAN**



H.IDIL ADHA, ST
PENATA (III/C)
NIP.19761202 201212 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan hasil analisi informasi penanganan pengaduan pelayanan Pertanahan	Jumlah Laporan hasil analisi informasi penanganan pengaduan pelayanan pertanahan	Laporan	1
2	Tersedianya dokumen bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan kepada stakholder	Jumlah dokumen bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan kepada stakeholder	Dokumen	1
3	Tersedianya laporan risalah pengolahan data kasus pertanahan	Jumlah laporan risalah pengolahan data kasus pertanahan	Laporan	1

4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
6	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	114.500.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 114,500,000	APBD

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
KABID SENGKETA TANAH


SUNARTO, SP., MM
PEMIBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19670223 199803 1 004

Pihak Pertama,
**PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORD PENYULUH PERTANAHAN**


H.IDIL ADHA, ST
PENATA (III/C)
NIP.19761202 201212 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA GUNAWAN,S.Hut.M.Si**

Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub Koord Data Dan Pemetaan Tematik**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral Yaitu melaksanakan kegiatan Survey, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara Teknis maupun Yuridis yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengolahan Data, Pengendalian, Pembinaan dan Pelayanan Informasi

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator Pemetaan dan Data Tematik :

Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

1. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

3. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
4. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
5. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
6. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORD DATA PEMETAAN DAN
TEMATIK**



**SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008**



**INDRA GUNAWAN,S.Hut.M.Si
PENATA TK.1 (III/D)
NIP.19810627 201001 1012**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan survey	Jumlah Laporan Pekerjaan Survey	Laporan	12
2	Melakukan Koordinasi dan penyuluhan kegiatan survey kadastral	Jumlah Laporan Penyuluhan Survey Kadastral	Laporan	12
3	Menelaah data dan informasi Bidang tanah pada lokasi sampel	Jumlah Laporan Data Informasi Bidang Tanah pada Lokasi Sampel	Laporan	12
4	Mengolah data hasil pengukuran Batas bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengukuran Batas Bidang	Laporan	12
5.	Melakukan Digitasi dan Kompilasi Peta	Jumlah Laporan Digitasi dan Kompilasi Peta	Laporan	12

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR DATA PEMETAAN DAN TEMATIK

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	1
2	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil kegiatan inventariasasi tanah kosong	Dokumen	1

3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
4	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
5	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Sinkronasi Penyelesaian Tanah Kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 52.670.000,-	APBDP
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp. 50.540.000,-	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp.103.210.000,-	APBDP


Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORD DATA PEMETAAN DAN
TEMATIK**



INDRA GUNAWAN, S.Hut.M.Si
PENATA TK.1 (III/D)
NIP.19810627 201001 1012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN PERUBAHAN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YOVITA DWI ANDHINI,SH**

Jabatan : **PENATA KADASTRAL AHLI MUDA SELAKU SUB KOORD
PENGUATAN HAK ATAS TANAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan Penguatan Hak Atas Tanah
2. melaksanakan kegiatan Pengukuran secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi tentang pelaksanaan sertipikasi tanah-tanah Aset Pemda yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. menyusun daftar lokasi, menyiapkan informasi dasar, melakukan koordinasi kegiatan survey kadastral dan Inventarisasi tanah-tanah Aset Pemerintah Daerah dengan unsur terkait Desa / Kelurahan dan Kecamatan
4. melakukan dokumentasi visual lokasi sampel survey kadastral dan mewawancara narasumber di lapangan dalam rangka mencari data fisik yuridis serta memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah disertai data pendukung.
5. melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka pendaftaran tanah dan melakukan analisis hasil kegiatan pemeriksaan tanah serta melakukan verifikasi bahan usulan pengisian blanko sertipikat hak atas tanah.
6. melakukan telaahan dan pemeriksaan dokumen pendaftaran sertipikat hak pakai.

7. melakukan pengelolaan dan penyajian data pertanahan dan menganalisis data hasil peninjauan lapangan atau lokasi penguatan hak atas tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.
8. menganalisis data hasil peninjauan lapangan atau lokasi penguatan hak atas tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

9. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
10. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
11. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
14. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
15. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
16. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
17. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORD Penguatan Hak Atas
TANAH**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

YOVITA DWI ANDHINI, S,H
PENATA TK.1/III.d
NIP.19800107 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Penguatan Hak Atas Tanah	Jumlah laporan pekerjaan Penguatan Hak Atas Tanah	Dokumen	1
2	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengukuran secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi tentang pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah Aset Pemda yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengukuran secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi tentang pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah Aset Pemda yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.	dokumen	1
3	Tersedianya laporan hasil menyusun daftar lokasi, menyiapkan informasi dasar, melakukan koordinasi kegiatan survey kadastral dan Inventarisasi tanah-tanah Aset Pemerintah Daerah dengan unsur terkait Desa / Kelurahan dan Kecamatan	jumlah laporan hasil menyusun daftar lokasi, menyiapkan informasi dasar, melakukan koordinasi kegiatan survey kadastral dan Inventarisasi tanah-tanah Aset Pemerintah Daerah dengan unsur terkait Desa / Kelurahan dan Kecamatan	dokumen	1

4	Tersedianya laporan hasil dokumentasi visual lokasi sampel survey kadastral dan mewawancara narasumber di lapangan dalam rangka mencari data fisik yuridis serta memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah disertai data pendukung.	jumlah laporan hasil dokumentasi visual lokasi sampel survey kadastral dan mewawancara narasumber di lapangan dalam rangka mencari data fisik yuridis serta memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah disertai data pendukung.	dokumen	1
5	Tersedianya laporan hasil pemeriksaan tanah dalam rangka pendaftaran tanah dan melakukan analisis hasil kegiatan pemeriksaan tanah serta melakukan verifikasi bahan usulan pengisian blanko sertipikat hak atas tanah.	jumlah laporan hasil pemeriksaan tanah dalam rangka pendaftaran tanah dan melakukan analisis hasil kegiatan pemeriksaan tanah serta melakukan verifikasi bahan usulan pengisian blanko sertipikat hak atas tanah.	dokumen	1
6	Tersedianya laporan hasil telaahan dan pemeriksaan dokumen pendaftaran sertipikat hak pakai.	jumlah laporan hasil telaahan dan pemeriksaan dokumen pendaftaran sertipikat hak pakai.	dokumen	1
7	Tersedianya laporan pengelolaan dan penyajian data pertanahan dan menganalisis data hasil peninjauan lapangan atau lokasi penguatan hak atas	Jumlah laporan hasil pengelolaan dan penyajian data pertanahan dan menganalisis data hasil peninjauan lapangan	dokumen	1

	tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.	atau lokasi penguatan hak atas tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.		
8	Tersedianya laporan analisis data hasil peninjauan lapangan atau lokasi penguatan hak atas tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.	jumlah laporan analisis data hasil peninjauan lapangan atau lokasi penguatan hak atas tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.	dokumen	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PENGUATAN HAK ATAS TANAH

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan sertipikasi tanah aset pemerintah kabupaten	Meningkatnya legalitas tanah / sertipikat hak pakai tanah aset pemerintah daerah	Bidang tanah/ persil	100
2	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan identifikasi dan pemetaan tanah aset pemerintah kabupaten	Meningkatnya data tanah aset daerah yang teridentifikasi	dokumen	1
3	Tersedianya surat klarifikasi lahan aset pemda	Meningkatnya klarifikasi lahan aset pemda	surat	30
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100

		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
6	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong subkegiatan pemanfaatan tanah kosong	Rp. 355.330.500	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 355.330.500	APBDP

Kutai Kartanegara, Oktober 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORD PENGUATAN HAK ATAS
TANAH**



YOVITA DWI ANDHINI, S.H
PENATA TK.1/III.d
NIP.19800107 201001 2 002